

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

INTAN NURVITA

NIM. 15810012

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

INTAN NURVITA

NIM. 15810012

PEMBIMBING:

Drs. SLAMET KHILMI

NIP. 19630219 201503 1 002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-992/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2019

Tugas akhir dengan judul : "ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2013-2017"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Intan Nurvita
NIM : 15810012
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003


Dr. Abdul Haris, M.Ag.
NIP. 19710423 199903 1 001

Yogyakarta, 18 Desember 2019
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Intan Nurvita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Intan Nurvita

NIM : 15810012

Judul Skripsi : **“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaiku Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2019

Pembimbing,



Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Nurvita

NIM : 15810012

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRAHA
YOGYAKARTA

Penyusun



Intan Nurvita

NIM: 15810012

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nurvita

NIM : 15810012

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

‘Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017’.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 20 November 2019

Yang menyatakan,



Intan Nurvita

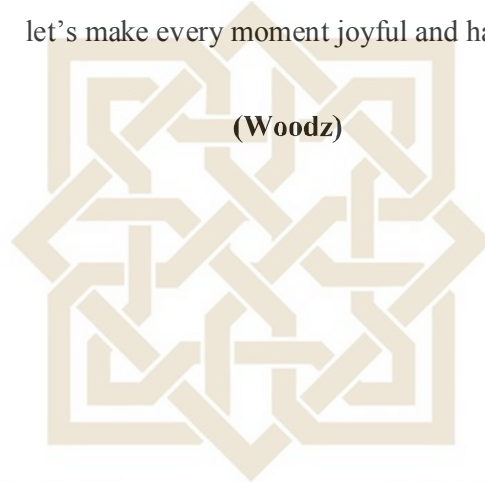
MOTTO

Always be thankful for everything you have

-Things that thought to be repetitive in every day are different in every minute, every second. My feeling, my thought, all the things can't always be the same so

let's make every moment joyful and happy-

(Woodz)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas ridho Allah SWT, skripsi ini saya

persembahkan:

Teruntuk kedua orangtua saya, Bapak Dulchalim dan Ibu Suratmi. Terima kasih yang tiada terkira dalam bilangan dan tiada terbatas dalam waktu. Terima kasih untuk segala doa dan dukungannya.

Teruntuk yang tersayang keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah menemani berjuang sejauh ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017**”. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr.Sunaryati, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muh. Rudi Nugroho, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal proses perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Drs. Slamet Khilmi selaku Dosen Pembimbing Skripsi senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Keluarga tercinta, Bapak Dulchalim, Ibu Suratmi, Yan Primadiansah, Dwi Oktaviami Putri, Putri Nur Indah Lestari, Septian Setiya Pratama dan keponakanku tersayang Hanum Setiya Nafia yang selalu mendoakan dan mendukung selama ini.
9. Keluarga Besar Pogung, Bulek Nen, Pak Mul, Anggita, Fitri, dan Angga yang telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku Tiara Sabila, Umni Khusniati Rofiqoh, Yuliasti Linawati, Nurul Hasanah, Wati Lestari, Eka Asbarini, Alfi Nur Aini, dan Lolo Nara Suryana. Terimakasih telah memberikan banyak motivasi dan dukungan.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah A sebagai keluarga pertama dalam menempuh pendidikan di FEBI UIN Suka yang selalu mendukung satu sama lain.
12. Keluarga besar Sekar Arum (Ekonomi Syariah 2015) yang senantiasa saling membantu dan mendoakan satu sama lain.
13. Teman-teman KKN Kelompok 32 Dusun Ngulakan, Kelurahan Hargorejo, Kec.Kokap, Kulon Progo. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan.
14. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Ekonomi Syariah 2018 yang telah memberikan berbagai pengalaman organisasi, arti kekompakan dan leadership.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi, serta pihak-pihak yang telah mendukung selama menempuh masa studi yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semoga semua hal yang telah diberikan kepada penyusun dapat dinilai sebagai nilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun maupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 November 2019

Penyusun



Intan Nurvita

NIM. 15810012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR GRAFIK..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| ABSTRAK | xxiv |
| <i>ABSTRACT</i> | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS..... | 13 |
| A. Landasan Teori | 13 |
| 1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah..... | 13 |
| 2. Pengukuran Efisiensi | 14 |
| 3. Efisiensi dalam Islam..... | 18 |
| 4. Pendapatan Asli Daerah..... | 20 |
| 5. Dana Alokasi Umum..... | 23 |
| 6. Dana Alokasi Khusus..... | 25 |
| 7. Belanja Daerah..... | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 8. Teori Kemiskinan..... | 30 |
| 9. Kemiskinan dalam Perspektif Islam | 32 |
| B. Telaah Pustaka | 35 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 42 |
| D. Pengembangan Hipotesis | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 47 |
| A. Jenis Penelitian | 47 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 47 |
| C. Sumber dan Jenis Data..... | 48 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 48 |
| 1. Variabel <i>Input</i> | 49 |
| 2. Variabel <i>Output</i> | 50 |
| E. Metode Analisis | 50 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Deskripsi Umum Penelitian | 56 |
| B. Deskripsi Variabel Penelitian | 58 |
| C. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Tengah Tahun 2013-2017 dengan <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) | 64 |
| 1. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Banyumas | 65 |
| 2. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Kedu..... | 67 |
| 3. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Pati..... | 69 |
| 4. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Pekalongan..... | 71 |
| 5. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Semarang | 72 |
| 6. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Surakarta | 73 |
| D. Efisiensi Kinerja Fiskal..... | 74 |
| BAB V KESIMPULAN | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka | 37 |
| Tabel 4.1 Realisasi DAU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... | 57 |
| Tabel 4.2 Realisasi DAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... | 58 |
| Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 | 73 |
| Tabel 4.4 Rincian DAK Anggaran Fisik TA 2016 | 77 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1.1 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... | 3 |
| Grafik 1.2 Kontribusi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2017 4 | |
| Grafik 1.3 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2015-2017 | 7 |
| Grafik 4.1 Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 | 55 |
| Grafik 4.2 Realisasi Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... | 60 |
| Grafik 4.3 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Banyumas..... | 62 |
| Grafik 4.4 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Kedu | 64 |
| Grafik 4.5 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Pati | 66 |
| Grafik 4.6 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Pekalongan | 68 |
| Grafik 4.7 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Semarang..... | 69 |
| Grafik 4.8 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Surakarta..... | 70 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Production Frontier dan Efisiensi Teknis..... | 15 |
| Gambar 2.2 Kerangka Penelitian..... | 41 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-------|
| Lampiran 1 Data Penelitian <i>input</i> dan <i>ouput</i> | I |
| Lampiran 2 Hasil <i>Output Data Envelopment Analysis</i> (DEA) | XV |
| Lampiran 2.1 Hasil Output DEA Tahun 2013..... | XV |
| Lampiran 2.2 Hasil Output DEA Tahun 2014..... | XVII |
| Lampiran 2.3 Hasil Output DEA Tahun 2015..... | XIX |
| Lampiran 2.4 Hasil Output DEA Tahun 2016..... | XX |
| Lampiran 2.5 Hasil Output DEA Tahun 2017..... | XXII |
| Lampiran 3 Curriculum Vitae (CV)..... | XXVII |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Keberhasilan kinerja fiskal merupakan tolok ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat diprosikan dengan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga berdampak pada kinerja fiskal yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan DEA menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisien kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 tidak mencapai nilai efisiensi yang sempurna. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi kinerja fiskal di Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 belum efisien dengan skor 58,5%. Tingkat efisiensi kinerja fiskal 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki trend yang fluktuatif. Inefisiensi disebabkan adanya indikasi bahwa adanya pemborosan dalam penggunaan variabel input.

Kata kunci: kinerja fiskal, efisien, APBD, Jumlah Penduduk Miskin



ABSTRACT

The success of fiscal performance is a benchmark for measuring the level of community welfare. Community welfare indicators are proxied with the number of poor people. Increasing the welfare of the community will affect the decline in the number of poor people, thus impacting the efficient fiscal performance. This study aims to measure performance in districts/cities in the province of Central Java by using Data Envelopment Analysis (DEA) approach. The results obtained using the DEA approach indicate that the average level of efficient fiscal performance of regencies/cities in Central Java in 2013-2016 did not achieve a perfect efficiency value. Overall the average level of efficiency of fiscal performance in Central Java during 2013-2017 was not efficient with a score of 58.5%. The level of fiscal performance efficiency of 35 regencies / cities in Central Java Province has a fluctuating trend. Inefficiency is caused by an indication that there is a waste of using input variables.

Keywords: fiscal performance, efficient, Regional Government Budget, Poor Population



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara suatu negara dengan negara lainnya. Lima isu sentral yang sering menjadi perdebatan dalam desentralisasi fiskal adalah alokasi dari masing-masing fungsi fiskal, efektivitas penugasan penerimaan, instrumen perpajakan yang tepat, peranan dana transfer pemerintah dan pengalihan tanggung jawab dari pusat ke daerah. Kelima isu sentral ini seringkali dijadikan pertanyaan tentang peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pembangunan daerah (Mahmudi, 2015: 46).

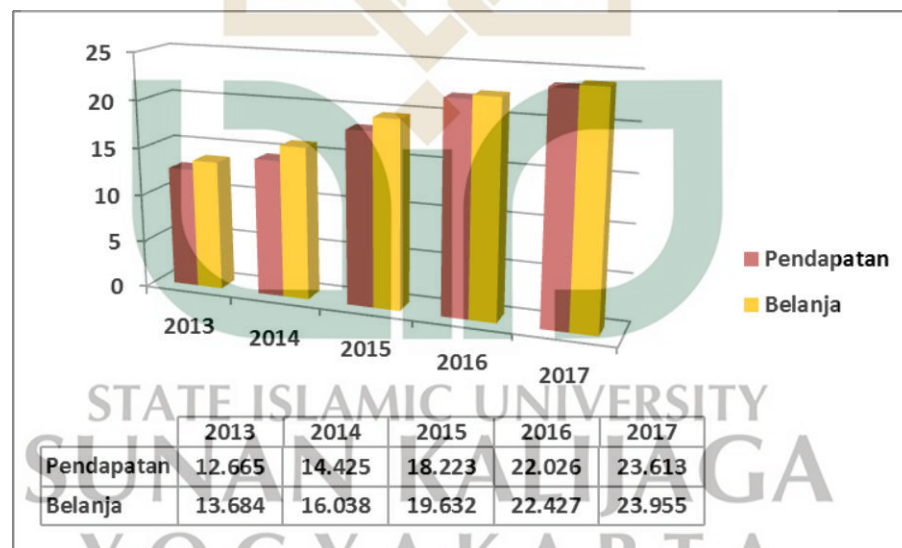
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Kenyataan yang

terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat (Kuncoro, 2014: 51).

Secara teoritis, anggaran Negara memiliki sejumlah fungsi, yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi merujuk fungsi anggaran sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Tantangan nyata sekarang adalah menjalankan fungsi alokasi dan distribusi. Dalam mengawasi fungsi tersebut, anggaran Negara kita masih belum efektif. Misalnya, anggaran Negara dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi masih jauh dari memuaskan (Rofiq, 2014: 73).

Disamping itu pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu pertimbangan dari penerapan desentralisasi fiskal menurut perspektif kepentingan ekonomi adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dianggarkan dengan realisasi yang diterima. Jika realisasi biaya lebih rendah dibandingkan biaya yang dianggarkan, maka kinerja pemerintah dinilai mampu melakukan efisiensi. Sebaliknya jika realisasi biaya lebih tinggi dibandingkan biaya yang dianggarkan, maka kinerja pemerintah dinilai kurang baik karena dimungkinkan terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010: 107).

Banyaknya kendala di daerah dalam mendayagunakan hak untuk memungut pajak daerah dan menarik retribusi, membuat daerah sulit meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pembangunan yang dilakukan oleh Daerah karena PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

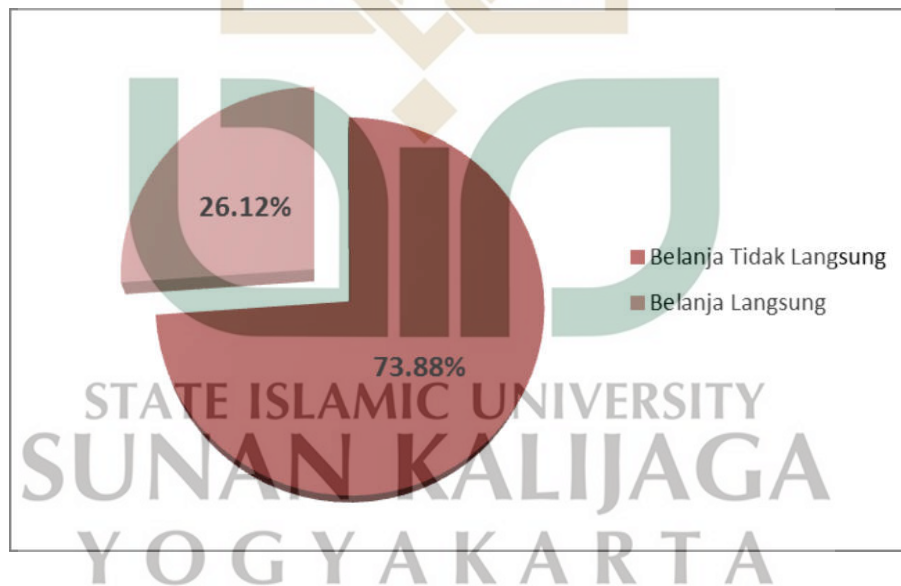


Grafik 1.1 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (triliun rupiah)

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan grafik 1.1 Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017. Anggaran pendapatan meningkat dari Rp23,61 triliun menjadi Rp24,51 triliun. Peningkatan ini utamanya

didorong oleh peningkatan komponen Pajak Daerah, seiring dengan gencarnya upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Seiring dengan peningkatan penganggaran pendapatan, belanja daerah juga dianggarkan meningkat, dari Rp23,95 triliun menjadi Rp25,36 triliun. Prioritas penggunaan anggaran masih ditujukan pada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan tambahan fokus pada sektor pendidikan. Secara keseluruhan, peningkatan anggaran belanja yang melebihi peningkatan anggaran pendapatan berdampak pada pelebaran defisit anggaran pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp846 miliar.



Grafik 1.2 Kontribusi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Triwulan IV 2017

Sumber: Bank Indonesia

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp24,66 triliun dari total anggaran belanja 2017 sebesar Rp25,36 triliun. Realisasi ini cukup tinggi

dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2016. Meningkatnya realisasi belanja terutama didorong oleh komponen belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung, serta peningkatan realisasi belanja hibah dan belanja bagi hasil pada kelompok belanja tidak langsung. Belanja langsung utamanya ditujukan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp4,05 triliun.

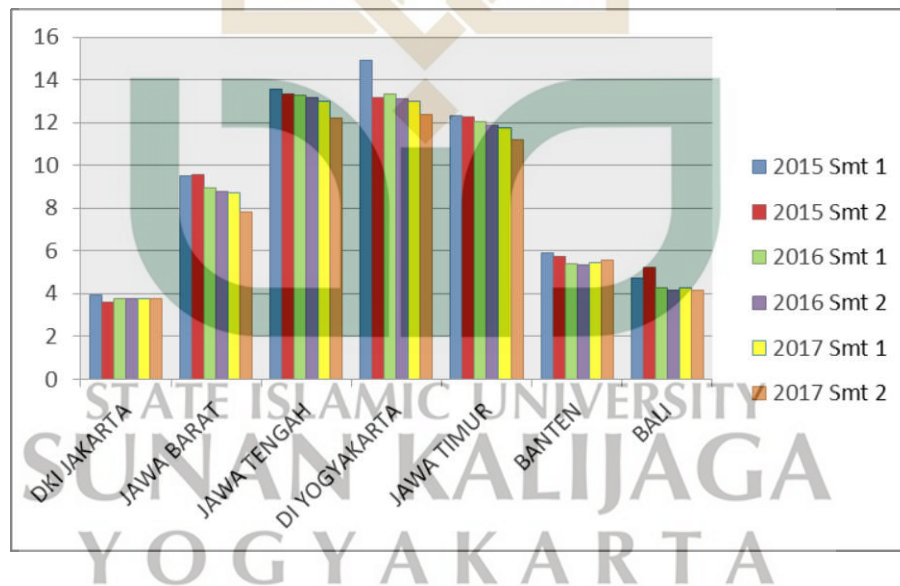
Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di level pusat yang meningkat di triwulan laporan, salah satunya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Sementara, realisasi belanja pegawai pada triwulan laporan cenderung stabil. Realisasi Belanja Modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,6 Triliun, atau terserap 89,59% dari total anggaran belanja modal. Berdasarkan pola historisnya selama 5 tahun terakhir, sebagian besar belanja modal (>50% dari total anggaran belanja modal) baru akan terealisasi pada triwulan III dan IV tahun pelaporan, ketika vendor telah mengajukan tagihan. Belanja modal ini banyak digunakan untuk mendukung program prioritas Jawa Tengah, salah satunya adalah pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan untuk peningkatan konektivitas.

Komponen Belanja Tidak Langsung juga mencatatkan penyerapan yang lebih baik dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai menyumbang 31,65%. Realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan utamanya dalam rangka penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan Program Keluarga Harapan. Realisasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan

menjadi Rp4,97 triliun, menunjukkan semakin baiknya kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing Kabupaten/ Kota di tahun lalu. Realisasi bansos ini meningkat dibandingkan tahun lalu di tengah upaya revitalisasi beberapa daerah, serta meningkatkan kegiatan sosial. Selain itu, beberapa program untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan berimplikasi pada serapan realisasi bansos yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Setiap tahun angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Namun angkanya tidak signifikan jika dilihat dari peningkatan anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya. Tentu saja kabar ini menggembirakan dan melegakan. Meski demikian, ada beberapa masalah krusial yang perlu dipertanyakan kembali. Apakah pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut sebagai pertanda bahwa pembangunan ekonomi telah benar-benar dinikmati oleh penduduk miskin. Jika kualitas pembangunan kita tinggi, maka standar ukuran kemiskinan juga tinggi. Rendahnya kualitas pembangunan ini terlihat dari akses masyarakat miskin terhadap hasil-hasil pembangunan yang juga rendah. Kualitas pembangunan yang rendah juga tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan yang kurang mengenai sasaran. Salah satu penyebab lambannya penurunan kemiskinan adalah kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Jika kita cermati, ada beberapa hal yang menyebabkan anggaran daerah kurang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pertama, rendahnya efektivitas belanja sosial dalam mengatasi

kemiskinan. Saat ini alokasi anggaran untuk jaminan sosial begitu banyak, tapi hasilnya tidak optimal. Bisa jadi ada dana tersebut yang belum tepat sasaran. Kedua, penyaluran Dana Alokasi Khusus atasi kemiskinan belum efisien. Hal ini disebabkan DAK banyak bocor di daerah, sehingga alokasi pengentasan kemiskinan di daerah tidak mengenai sasaran. Padahal jumlah penduduk miskin ada di daerah dan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang besar adalah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas dan efisiensi anggaran daerah dalam mendorong perekonomian daerah (Rofiq, 2014: 74-75).



Grafik 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa tahun 2015-2017 (ribu jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan grafik 1.3 dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Atau dengan kata lain kebijakan desentralisasi fiskal belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah kemiskinan.

Terkait dengan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada grafik 1.3 dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua provinsi yang menyumbang angka kemiskinan terbanyak, yaitu sekitar 4,20 juta jiwa. Lebih dari 3 juta penduduk berada di pedesaan dan 1,2 juta di kota-kota besar dengan batas penghasilan per bulan berada di angka Rp333.224. Menurut Suandi (2014: 8) ini disebabkan karena adanya ketimpangan anggaran antardaerah yang diperkuat oleh sistem dan strategi alokasi yang tidak seimbang. Namun demikian Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang selalu mendapatkan porsi anggaran besar karena sistem alokasi anggarannya tidak pernah berubah. Hal tersebut yang menjadi alasan penyusun menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2007), menunjukkan bahwa berdasarkan data-data perkembangan penerimaan daerah maupun transfer fiskal yang diterima masing-masing daerah menunjukkan adanya perbedaan yang relatif besar. Selain itu, Vera (2013) menunjukkan bahwa kebijakan kapasitas fiskal daerah akan berdampak pada percepatan pengentasan kemiskinan dibandingkan kebijakan transfer fiskal, karena lebih memihak pada mayoritas penduduk miskin, yaitu rumah tangga pertanian.

Penelitian lain dilakukan oleh Kristiyanto (2017) yang menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin. Namun, apabila belanja langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah, belanja tidak langsung mempunyai hubungan yang searah.

Sehingga, apabila belanja langsung mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan jumlah rumahtangga miskin, sedangkan apabila pemerintah menambah jumlah belanja tidak langsung, maka akan menambah pulajumlah rumah tangga miskin. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pencapaian efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran terkait dengan pengambilan kebijakan fiskal yang efisien masalah kemiskinan dan pengangguran di provinsi seluruh Indonesia.
2. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi: Menambah wawasan bagi para akademisi mengenai efisiensi kebijakan fiskal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memberikan wadah bagi para akademisi untuk memberikan masukan kebijakan melalui hasil riset yang mereka lakukan

3. Bagi peneliti: Penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa efisien kinerja fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bagian diantaranya:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab I akan dipaparkan mengenai gambaran fenomena dan permasalahan yang melandasi penelitian ini. Gambaran tersebut akan didukung dengan data, teori dan penelitian sebelumnya.

BAB II Landasan teori yang berisi tentang definisi, konsep, serta berbagai hal yang terkait dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian dan bersumber dari buku, artikel maupun jurnal. Pada bagian ini juga dipaparkan tentang teori yang melandasi hubungan antar variabel dihubungkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu ada pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar topik yang diteliti oleh penyusun.

BAB III Metode penelitian berisi tentang deskripsi penelitian ini dilakukan dan menjelaskan setiap variabel penelitian. Pada bagian ini juga menjelaskan tentang obyek penelitian seperti sumber data, jenis penelitian, hingga alat analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil perhitungan olahan data serta interpretasi terkait hasil perhitungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisis tingkat efisiensi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada tahun 2013-2017 didapatkan hasil bahwa secara umum tingkat efisiensi kinerja fiskal 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki trend yang fluktuatif. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi kinerja fiskal di Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 belum efisien dengan skor 58,5%.
2. Secara bersamaan rata-rata 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami inefisiensi berturut-turut tahun 2013-2017. Artinya pemerintah daerah harus mengevaluasi pelaksanaan APBD di masing-masing kabupaten/kota. Karena inefisiensi disebabkan adanya indikasi bahwa kabupaten/kota yang mengalami inefisiensi dikarenakan adanya permasalahan terkait alokasi dalam penggunaan variabel input. Seperti halnya alokasi dana yang belum optimal penggunaannya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi perlu melakukan perbaikan pada *input* maupun *output*-nya. Dari sisi *input*, disarankan perencanaan dan pengawasan dalam penggunaan dana.

Sehingga tidak terjadi kembali kesalahan yang mengakibatkan rendahnya alokasi transfer ke daerah. Sedangkan dari sisi *output*, perbaikan dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah *output* demi mencapai efisiensi. Hal ini ditunjukkan terutama pada wilayah-wilayah yang tingkat efisiensinya sangat rendah.

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan kinerjanya dalam mengalokasikan APBD. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan wewenangnya untuk mengalokasikan anggarannya dengan lebih cermat, efektif dan efisien.
3. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah hendaknya pemerintah daerah Jawa Tengah lebih meningkatkan program pembangunan yang menitik beratkan pada bidang pendidikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita & B. Hendra Puranta. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Coelli T.J, et.al. 2005. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition*. New York: Spinger Science + Business Media, Inc.
- Chapra, M Umer. 2001. *The Future of economics perspective*. Jakarta: Tim Penerbitan SEBI.
- Chusnah, Saidatul. 2014. *Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: INDEKS.
- Estomihi, Hutabarat .2016. “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan*” .Universitas AtmaJaya Yogyakarta Jalan Babarsari -44, Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Farah, Aruni.2018. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo*”. Universitas Sains Al-Qur’an Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Farrel, M. J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of Royal Statistic Society*, Series A : 53-81.
- Hakim, Abdul. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Hamid, Edy Suandi. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Banten: Universitas Terbuka.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Kristiyanto, Sony, dkk. 2017. *Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kurnia, Ahmad Syakir. 2005. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Dengan Metode FDH. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Lisna, Vera, dkk. 2013. *Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Pascasarjana IPB.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Martono, Agus Harjito. 2010. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Noor, Henry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap IPM (Studi Kasus di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol.25 No.1 2012:1-12
- Suharsih, Sri dan Didi Nuryadin. 2017. Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta.
- Pamula, Yanitra Ega. 2012. Efisiensi Sektor Publik: Pendekatan Envelopment Analysis Indonesia 201-2008. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Pareto, Vilfredo dan Hans L Zetterberg. *the Rise and Fall of Elites: an Application of Theoretical Sociology*. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1991.

- Pertiwi, L.D. 2007. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 12 (2), Agustus 2007, hlm. 123-139.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Rofiq, Aunur. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*. Jakarta: Republika.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sebayang, Asnita Frida. 2015. Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Islam Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Tasmara, Toto. 2002. *Membangun Etos Kerja Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lampiran 3

Curriculum Vitae (CV)

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Intan Nurvita
TTL : Brebes, 6 Juni 1997
Alamat : Pogung Kidul SIA XVI
RT002 RW049 No.4,
Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta
e-mail : intanurvita@gmail.com
No. HP : 085742551731



B. Riwayat Pendidikan

2003-2004 : TK Permata Jatibarang
2004-2009 : SDN Jatibarang Lor 02
2009-2012 : MTs Negeri Slawi
2012-2015 : SMAN 1 Slawi
2015-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

2013-2014 : Sekretaris PASMA SMAN 1 Slawi
2018-2019 : Div. Media dan Komunikasi HMPS Ekonomi Syariah

D. Pengalaman Kepanitiaan

April 2018 : Sie. Dokumentasi Pelatihan Kepenulisan
Mei 2018 : Sie. Acara Pelatihan *Design*
Mei 2018 : Sie. Dokumentasi Seminar Nasional dan
Konsorsium Keilmuan Prodi
Ekonomi Syariah
Oktober 2018 : Sie. Konsumsi *Sharia Economic Fair 4th*
November 2018 : Sie. Dokumentasi Pelatihan *Leadership*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA